

DAFTAR REFERENSI

Buku

- AbduIlah, Faisal. *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKap-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Adhayanto, Oksep. *Eksistensi Hak Preogratif Presiden*, UMRAH Press, Tanjungpinang, 2015.
- Ama La Nora, Ghazaly. *Ilmu Komunikasi Politik*, CV. ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Cet 1, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010.
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Fendri, Azmi. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral dan Batu Bara*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2016.
- Gaffar, Jenedjri M. *Demokrasi Konstitusi*, Konpress, Jakarta, 2012.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Huda, Ni'matul & Riri Nazriyah. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Mexasai Indra, Oksep Adhayanto & Pery Rehendra Sucipta. *Hukum Administrasi Negara*, Samudra Biru, Yogyakarta, 2021.
- Modul Pelatihan Dasar CPNS, *Manajemen Aparatur Sipil Negara*, Lembaga Administrasi Negara, 2017.
- Moleong, L. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.

- Mulyasa, E. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Pegawai*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.
- Nurcholis, Hanifah. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2002.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta, 1986.
- Sumbu, Telly dkk, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Aziz Syamsuddi, *Proses dan Teknik penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Thoha, Miftah. *Birokrasi dan Politik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Winarno, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- WJS, Poerwasunata. *Kamus bahasa Indonesia edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Jurnal/Makalah/Paper

- Barhamudin. “*Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.*” *Jurnal Solusi*, Vol 17, No. 2 (2019).
- Berry, Michael Frans. “*Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan.*” *Muhammadiyah Law Review*. Vol. 2, No. 2 (2018).
- Dadang Mokodongan, dkk. “*Promosi Jabatan dalam Meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pemerintah Kota Kotamobagu.*” *Jurnal Eksekutif* , Vol 3, No. 3 (2019).

- Firmansyah, Vicky Zaynul, Firdaus Syam. *Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia*, Jurnal Antikorupsi, Vol.7, No. 2 (2021).
- Gunawan, Andy. I Wayan Arthanaya and Luh Putu Suryani, *Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara*, Jurnal Analogi Hukum, Vol 1, No. 1 (2019).
- Irfani, Nurfaqih. “*Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum.*” Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 16, No. 3 (2020).
- Jaya, I Gusti Ngurah Surya Semara. Sukranatha And Anak Agung Ketut, *Tinjauan Yuridis Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Bali No. 58 Tahun 2017*. Jurnal Ilmu Hukum , Vol 7, No.3 (2019).
- Martin, J. *Studi Tentang Proses Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Kota Samarinda*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 3, No. 4 (2015).
- Muzayanah. “*Pemahaman Terhadap Tanggungjawab, Hak Dan Kewajiban Pegawai Terhadap UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*”. Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 6 No 1, (2020).
- Rakhmawanto, Ajib. “*Analisis Politisasi Birokrasi Dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara*”. Jurnal Civil Service VOL. 14, No. 2, (2020).
- Rokilah. “*The Role of The Regulations in Indonesia State System.*” Jurnal Ajudikasi, Vol 4, No. 1 (2020).
- Sucipta, Pery Rehendra. “*Kekuatan Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Keputusan (Beschikking) Dihubungkan Dengan Penerapan Asas Praesumptio Iustae Causa*”. Jurnal Selat, Vol 2, No. 1 (2017).
- Sufriadi. “*Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia.*” Jurnal Yuridis, Vol 1, No. 1 (2017).
- Susanto, Adi. Fachruzzaman and Abdullah, “*Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Provinsi Bengkulu.*” Jurnal Fairness, Vol 10, No. 1 (2020).

Suratno, Sadhu Bagas. *Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik*, E-Journal Lentera Hukum, Vol 4, No. 3 (2017).

Yulianti, Ririn. “*Evaluasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kota Banjar.*” Jurnal Pemerintahan dan Politik, Vol 7, No. 2 (2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN.2011/No. 82, TLN No. 5234)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Administrasi Pemerintahan (LN.2014/No. 292, TLN No. 5601)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (LN.2014/No. 6, TLN No. 5494)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (LN.2014/No. 244, TLN No. 5587)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Tata Cara pembayaran dan Standar Biaya Keluaran Tunjangan lainnya Walikota dan Wakil Walikota, Tambahan Penghasilan Pegawai dan Tambahan Penghasilan Objektif lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Internet

<https://bataminfo.co.id/2021/11/08/kasus-dugaan-korupsi-tpp-asn-wako-tanjungpinang-suherman-seperti-kasus-bupati-subang/>